AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI KASUS SEKOLAH DASAR NEGERI KECEME I SLEMAN)

Lina Rumanti

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri Keceme I Sleman. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah SD Negeri Keceme I sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS.

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Keceme I Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa narasumber diantaranya : Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Bendahara BOS dan guru SD Negeri Keceme I Sleman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup baik, yaitu dengan adanya rapat APBS, RKAS dalam perencanaan dana BOS, kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada sekolah dan pemerintah. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis dalam pengelolaannya.

Kata kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan, Dana BOS

**PENDAHULUAN**

Bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini pemerintah dihadapkan dengan berbagai permasalahan, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah dan banyak sekali ditemukannya berbagai masalah atau kendala pendanaan yang muncul. Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan pendidikan dan dapat tergambarkan dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Di Indonesia, menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pendidikan dan pembiayaan adalah dua komponen yang saling terkait satu sama lain sama pentingnya. Pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa biaya, dan pembiayaan dibutuhkan sebagai penunjang untuk memaksimalkan segala aspek dan sumber daya pada proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, manajemen keuangan pendidikan yang baik menjadi salah satu kunci penunjang keberhasilan tujuan pendidikan tersebut.

Sementara itu, Mulyasa (2011) mengemukakan bahwa: “Manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara *efektif, efisien*, tidak ada kebocoran-kebocoran, dan bebas dari penyakit *korupsi, kolusi, dan nepotisme*.” Berdasarkan pendapat Mulyasa tersebut, dapat dipahami bahwa manajemen keuangan yang baik, mulai dari perencanaan hingga *evaluasi* harus dirancang secara *koprehensif.*

Salah satu bentuk bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi masyarakat ialah dana BOS (BantuanOperasional Sekolah). Dana BOS ini ditujukan pada semua lembaga pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sekolah sebagai suatu *entitas* sekolah harus mampu mengelola dana BOS secara *profesional* dan *akuntabel* untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah dikelola secara mandiri oleh pihak sekolah melalui *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).* Dari sisi manajemen keuangan, MBS menurut pengelola sekolah mampu melakukan perencanaan, melaksanakan, *mengevaluasi* dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara baik dan *transparan.* Pengelolaan dana yang baik tidak terlepas dari prinsip *ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparasi,akuntabilitas*, keadilan, kejujuran dalam pengelolaan dan pengendalian.

Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di banyak daerah secara umum masih terbilang buruk. Penyelewengan dan penggelapan dana BOS dilakukan oleh oknum sekolah, dinas pendidikan, atau kelompok kerja sekolah. Pada tahun 2019 beberapa jaringan JPPI di daerah melaporkan adanya penyimpangan berupa penggelapan dana BOS dan juga model cashback. Adapun model penggelapan BOS adalah pada laporan pengadaan barang, tapi barangnya tidak ada. Selain itu, bunyi laporan tentang pengembangan perpustakaan, tetapi perpustakaanya masih buruk dengan buku-bukunya lama. Ada juga pada laporan tertulis untuk perbaikan toilet, tapi airnya mampet dan sanitasi jelek. Sementara itu, untuk kasus cashback, misalnya, setelah sekolah dapat dana BOS, mereka dikutip atau diminta setor uang terima kasih kepada oknum.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan buku yang berisi petunjuk teknis tentang penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah tiap tahunnya. Tujuan pemerintah menerbitkan buku petunjuk teknis setiap tahunnya agar pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, *transparan, akuntabel, efisiensi* dan *efektifitas,* tepat waktu, dan terhindar dari segala penyimpangan dan penyelewengan. Buku petunjuk teknis ini memuat penjelesan mengenai penggunaan dana BOS yang meliputi organisasi pelaksana, prosedur pelaksanaan BOS, penggunaan dana BOS, *monitoring* dan *supervisi*, pengawasan, pemeriksaan dan sanksi, pengaduan masyarakat dan formulir isian. Selain penggunaan dana BOS juga ada tentang petunjuk laporan keuangan BOS yang meliputi perpajakan, pertanggungjawaban keuangan dan formulir isian. Tercantumnya semua peraturan dan petunjuk yang diberikan pemerintah diharapkan sekolah mampu mengelola dan menggunakan dana tersebut secara *akuntabel*.

Pada tahun 2020 ini dana BOS akan disalurkan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah penerima dana. Dana BOS pada tahun 2020 dalam APBN dialokasikan sebesar Rp54,32 triliun untuk 45,4 juta jiwa. Angka Rp54,32 triliun tersebut meningkat sebesar 6,03% dibanding tahun 2019. Dana BOS dibagi menjadi 3 jenis, yaitu BOS reguler, BOS Kinerja dan BOS Afirmasi. Menurut pendanaannya BOS juga dibedakan menjadi dua yaitu Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS). Namun, pada penelitian ini akan berfokus pada BOSNAS.

Untuk tahun 2020, penyaluran Dana BOS diubah dari tadinya 4 kali menjadi 3 kali. Tahap I; 30%, tahap II; 40% dan tahap III; 30%. Dengan tiga kali, berarti akan jauh lebih sederhana. Jika dana BOS cepat diterima sekolah, kegiatan belajar mengajar akan berjalan lebih lancar dan gaji guru honorer tidak akan telat dibayarkan. Pada akhirnya, kebijakan untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju, akan lebih cepat dirasakan masyarakat Indonesia

Pengamatan / *Observasi* peneliti awal di SDN Keceme I Sleman yang menjadi lokasi dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pengelolaan program dana BOS di SDN Keceme I Sleman sudah baik, tetapi masih ada kekurangannya. Dalam pengelolaan dana BOS di SDN Keceme I Sleman dibentuk Tim Manajemen Sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Komite Sekolah, dan Guru. Untuk Pelaksanaanya bendahara sekolah dibagi menjadi tiga orang yaitu pemegang uang, penanggung jawab BOSDA, dan penanggung jawab BOSNAS. Permasalahan yang masih dialami oleh Tim Manajemen BOS di SDN Keceme I Sleman adalah kurangnya komunikasi antar pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana BOS.

Tujuan program BOS yang diluncurkan oleh pemerintah di SDN Keceme I Sleman adalah memberikan dan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu, agar dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih layak dan bermutu dalam rangka program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) 9 tahun. Berkenaan dengan hal itu dapat diambil kesimpulan bahwa SDN Keceme I Sleman sudah dapat terdanai dengan adanya dana BOS, meskipun tidak semua kegiatan sekolah dapat *tercover* dengan dana BOS. *Partisipasi* warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, komite sekolah dan walimurid merupakan *parameter* yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan *prinsip akuntabilitas* pengelolaan dana BOS. Mengacu pada latar belakang diatas, maka penulis mengambil penelitian dengan judul “Akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah ( studi kasus Sekolah Dasar Negeri Keceme I Sleman ).

**RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri Keceme I Sleman ?
2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri Keceme I Sleman ?

**LANDASAN TEORI**

**Pengertian pengelolaan**

Menurut Djamarah (2006 :174) pengelolaan sama artinya dengan *manajemen* :  “... istilah lain dari kata pengelolaan adalah *manajemen.* *Manajemen* adalah kata aslinya dari *bahasa Inggris*, yaitu *management* yang berati ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan”. Sedangkan Choirunnida (Djamarah, 2006 : 174) menjelaskan pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti : ‘Mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan yang mendapat imbuhan pe-an menjadi pengelolaan yang artinya mengurus suatu perusahaan dan organisasi dan sebagainya’.

Adapun menurut Keating (Cairunida, 2009 : 24), yang dimaksud dengan pengelolaan adalah bekerja dengan lewat orang-orang secara pribadi dan kelompok untuk mencapai tujuan *organisasional lembaga.* Pengelolaan terutama harus ditujukan kepada pencapaian tujuan kelompok/*lembaga*, dengan kata lain pengelolaan harus bisa bekerja dengan orang-orang/kelompok supaya bisa tercapai suatu tujuannya.

**Fungsi dasar Pengelolaan**

Terry (Torang, 2016 : 166) membagi empat fungsi dasar manajemen (pengelolaan), yaitu :

1) Perencanaan (*planning*),

2) pengorganisasian (*organizing*),

3) pengarahan (*actuating*), dan

4) pengawasan (*controlling*)’.

**Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Silele et al., (2017) mengatakan bahwa dana BOS merupakan program pemerintah untuk mebiayai kegiatan *non* *personalia* sekolah untuk mewujudkan program wajib belajar. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non personalia pada pasal 1 menjelaskan bahwa standar biaya operasi *non* *personalia* adalah standar biaya yang diperlukan selama 1 (satu) tahun periode yang bertujuan agar satuan pendidikan dapat berjalan dengan teraratur dan berkelanjutan sesuai dengan aturan standar pendidikan nasional. BOS menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan operasi sekolah dan dalam kehidupan masyarakat karena dapat mengurangi beban masyarakat.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah. Dana BOS bisa digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain.

Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 adalah peraturan yang dibuat oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan tentang petunjuk teknis dalam penggunaan atau pengelolaan dana BOS. Dalam petunjuk teknis ini tertera bagaimana *regulasi* yang harus ditaati oleh pengguna dana BOS dan semua teknis dalam pengelolaan dana BOS ada didalam petunjuk teknis yang harus diikuti oleh pengguna dana BOS. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah agar tujuan dari dana BOS tercapai secara *maksimal* dan menguranginya penyelewengan atau masalah lainnya. Petunjuk teknis dana BOS setiap tahunnya dilakukan pembaharuan dengan tujuan memberikan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya agar tercapainya tujuan yang direncanakan sejak awal.

**Tujuan BOS**

Menurut Andi et al., (2015), menjelaskan bahwa program dana BOS memiliki tujuan untuk dapat mebiayai biaya pendidikan guna meringankan beban masyarakat. Berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 juga menjelaskan bahwa tujuan dana BOS pada jenjang SD/SDLB dan SMP/SMPLB. Kedua tingkat ini memiliki tujuan yang sama yaitu:

1. Meringankan pendanaan dalam biaya operasi nonpersonalia, akan tetapi masih ada pendanaan untuk biaya personalia dari dana BOS;
2. Menghilangkan pemungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik;
3. Meminimalkan beban biaya sekolah bagi peserta didik; dan
4. Menghilangkan pungutan kepada pesesta didik yang orang tua/walinya tergolong kurang mampu

**Pengelolaan BOS menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah**

MBS merupakan suatu sistem yang digunakan oleh sekolah untuk mengelola sekolahnya agar tercapainya tujuan sekolah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 51 ayat (1), menjelaskan bahwa pengelolaan pendidikan pada tiga tingkat yaitu usia dini, tingkat dasar dan menengah harus berdasarkan standar dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Pratiwi (2016) menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan pemberian wewenang kepada pihak yang terlibat langsung dengan sekolah untuk mengatur pengelolaan sekolahnya sendiri yang bertujuan untuk memajukan sekolah. Model MBS yang baik adalah MBS yang *terstruktur* dalam suatu konsep sistem yang *efektif* dan *efesien* untuk mencapai tujuan pendidikan yang *produktif* (Ismail, 2008).

**Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggunganjawab. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.  *Akuntabilitas* dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. *Akuntabilitas* terkait erat dengan *instrumen* untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian. hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara *transparan* kepada masyarakat. (makplus, 2015)

*Akuntabilitas* merupakan istilah yang melekat dalam kajian tata pemerintahan *(Governance*). Akuntabilitas memiliki beberapa makna yang *terminologinya* sering dikaitkan dengan beberapa konsep seperti *answerability, responsibility, liability* dan *terminologi* lain yang berkaitan dengan harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat (Wibisono, 2018:6). Menurut Mardiasmo (2016:46) *akuntabilitas* adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Menurut Sujarweni (2015), *akuntabilitas* adalah bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa *akuntabilitas* merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. Akan tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaankewenangan.

**Penelitian Terdahulu**

1. (Masyitah, 2019) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus di SDN NOMOR 41 Birue kabupaten Baru). pada prinsipnya akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SD Negeri No.41 Birue sudah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan ketentuan , meskipun masih terdapat kendala teknis yang harus diperbaiki.
2. (Tutus, Supatmoko, & Kurrohman, 2017) Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS SDN Pringgowirawan 02 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2014. Adanya penggunaan lebih besar daripada rencana, adanya kekurangan dana antara yang digunakan dengan yang direncanakan, Realisasi sekolah harus dibenahi.
3. (Kafomay, 2020) Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Peningkatan Pelayanan Pendidikan di SMA Negeri 4 Jayapura. Adanya peningkatan dan penurunan penerimaan dana BOS sesuai jumlah siswa, pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah dan kepala sekolah.
4. (Muryati, 2016) Pengelolaan Dana BOS Pada SD Negeri di UPT Pelayaanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. Penyaluran, pembukuan, prinsip akuntabilitas serta pengawasan dan evaluasi sudah dilakukan.
5. (Efendi, 2018) Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri dan Swasta. Terdapat perbedaan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri dan Swasta yaitu sumber dana dan pelaporan.

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *deskriptif kualitatif* dengan tujuan untuk membahas permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, dan menerangkan suatu data atau keadaan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan tersebut berdasarkan data atau informasi yang telah didapatkan, kemudian dikumpulkan sehingga didapatkan informasi yang diperlukan untuk menganalisa masalah yang ada.

**Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat tentang penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. *Observasi*

Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2015:310) menyebutkan bahwa *observasi* merupakan dasar dari ilmu pengetahuan dengan adanyan observasi dapat menjelaskan data yang didapatkan langsung dilapangan. Dalam pelaksanaan *observasi* yang dilakukan peneliti, berpedoman pada lembar pengamatan (tabel 3.2). *Teknik observasi* digunakan untuk mengamati dan mencatat *realisasi* penggunaan dana BOS di SDN Keceme I Sleman.

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab untuk mendapatkan kesimpulan dari topik yang menjadi permasalah (Esteberg, 2002) dalam (Sugiyono, 2015:317. Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendukung data pengelolaan serta mengevaluasi program dana BOS. Adapun sasaran yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah TIM BOS sekolah yaitu kepala sekolah, komite sekolah, bendahara BOS dan guru.

1. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:329) dokumen merupakan data informasi yang sudah berlalu, dokumentasi menjadi pelengkapan dari metode observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai pelengkap informasi untuk membantu peneliti dalam memecah masalah yang sudah difokuskan.

**Uji Keabsahan Data**

Menurut sugiyono(2017:184) menyebutkan bahwa dalam menguji keabsahan data metode penelitian *kualitatif* menggunakan istilah berbeda dengan metode *kuantitaif*. Dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan melalui dua cara yaitu *Triangulasi* dan *Member Chek*.

**Analisa Data**

Tehnik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang di kumpulkan sehingga data tersebut dapat ditemukan kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri maupun oranglain. Menurut Miles and Huberman( dalam sugiyono, 2017:133), mengemukakan bahwa aktifitas dalam *analisis* data *kualitatif* dilakukan secara *interaktif* dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa *reduksi* data, penyajian data dan verifikasi data.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam penyusunan perencanaan dana BOS di SDN Keceme I Sleman diawali dengan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). APBS di susun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) selama satu tahun. Perencanaan penyusunan RKAS berdasarkan kebutuhan sekolah. sekolah membuat RKAS untuk menyusun rencana yang dirumuskan oleh satuan pendidikan sesuai dengan wewenangnya. Kegiatan yang paling di prioritaskan untuk di anggarkan dalam RKAS adalah kegiatan yang paling di butuhkan.

Untuk mengetahui perencanaan dana BOS di SDN Keceme I Sleman, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam menggali informasi yang terkait dengan hal itu, informasi dalam pengelolaan dana BOS SDN Keceme I Sleman yaitu kepala sekolah, bendahara BOS, guru dan komite sekolah:

Kepala sekolah dan tim manajemen BOS melakukan analisis kebutuhan untuk memperkirakan biaya pendidikan yang akan di keluarkan selama 1 tahun ajaran. Setelah melakukan analisis kemudian membuat rencana anggaran biaya dan program kegiatan yang akan di laksanakan selama periode 1 tahun ajaran. Komite dimintai saran dan pertimbangannya tentang program kegiatan tersebut, kemudian kepala sekolah dan bendahara BOS menyetujuinnya dan menandatanganinya.

Dalam pengelolaan dana BOS pada aspek perencanaan yang di dalamnya adalah penyusunan RKAS di SDN Keceme I Sleman sudah berjalan dengan baik dan benar. Dengan adannya tanggungjawab dari setiap penanggungjawab tiap kegiatan serta dalam penyusunan dan pembuatannya sudah melibatkan seluruh komponen sekolah. Dapat di simpulkan bahwa sistem pengelolaan dana BOS di SDN Keceme I Sleman dalam proses perencanaan penyusunan RKAS di SDN Keceme I Sleman sudah cukup baik yaitu adanya keterlibatan tim manajemen BOS, guru dalam perencanaan penyusunan anggaran dana BOS berupa RKAS dan APBS.

Dalam aspek pelaksanaan dana BOS di SDN Keceme I Sleman sudah menetapkan aturan yang berlaku pada Petunjuk Teknis BOS, terdiri dari beberapa hal yaitu: penyaluran dana BOS, pencairan/ pengambilan dana BOS, penggunaan dana BOS, pembelanjaan/ pengadaan barang dan jasa dan pembukuan dana BOS.

1. Penyaluran dana BOS

Penyaluran dana BOS dilakukan berdasarkan data dapodik siswa yang ada. Dana BOS yang diterima sekolah besarannya bervariasi sesuai dengan jumlah murid yang di ajukan oleh sekolah setiap periodenya. Berdasarkan aturan yang berlaku pada Petunjuk Teknis maka penyaluran dana BOS di lakukan setiap tiga kali selama 1 tahun. Jadi dalam satu tahun penyaluran dana BOS dilakukan 3 tahap yaitu tahap pertama pada bulan maret 2020 sebesar 30% dengan jumlah uang Rp 75.060.000,00, penerimaan pada tahap kedua pada bulan juni 2020 sebesar 40% sejumlah Rp 100.080.000,00, dan bulan september sebesar 30% dengan jumlah uang Rp 78.840.000,00.

1. Pengambilan / pencairan dana BOS

Proses pengambilan/ pencairan dana BOS di lakukan melalui Bank BPD DIY. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara BOS atau bisa diwakilkan jika mendesak serta syarat terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan kepada kepala sekolah bahwa pada aspek pengambilan dana BOS di lakukan oleh kepala sekolah dan bendahara BOS atau biasa diwakilkan asalkan giro sudah di tandatangani dan diberi stempel sekolah.

1. Penggunaan dana BOS

Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan hasil rapat yang telah di setujui dan di sepakati bersama yang tersusun dalam RKAS. Pelaksanaan kegiatan terkadang di tengah tahun pelajaran tidak sama dengan rencana RKAS yang sudah dibuat pada awal tahun sehingga tidak sesuai dengan anggaran yang sudah disepakati. Sekolah harus membuat perubahan RKAS karena kegiatan yang tidak terealisasikan maupun kegiatan tambahan tersebut. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 ini, adanya perbedaan dari RKAS disebabkan oleh dampak dari COVID-19 yang mengharuskan sekolah untuk membeli saranan dan prasarana agar dapat mencegah penularan virus tersebut. Banyak prasarana yang harus dibeli, untuk biaya penyemprotan, dan juga untuk membeli pulsa bagi anak –anak karena pembelajaran sifatnya daring atau online. Selain itu, kegiatan ekstrakulikuler juga menjadi tidak terealisasi.

Dana BOS yang seharusnya digunakan untuk mencukupi kegiatan yg tidak bisa direalisasikan pada masa pandemi pun akhirnya dilimpahkan untuk membeli atau memnuhi kebutuhan yang digunakan untuk pencegahan virus COVID-19 sesuai yang sudah dijelaskan pada permendikbud no 19 tahun 2020.

Berdasrkan Petunjuk Teknis BOS (JUKNIS) penggunaan dana BOS yang di terima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan – kegiatan berikut :

Penggunaan dana BOS yang telah di sebutkan di atas telah disesuaikan dengan hasil rapat penyusunan perencanaan RKAS. Apabila ada perubahan rencana pihak sekolah perlu melakukan konfirmasi dengan membuat rencana anggaran perubahan. Dari pemaparan diatas berdasarkan hasil wawancara dan teori tentang penggunaan dana BOS maka dapat di simpulkan bahwa SDN Keceme I Sleman telah menggunakan dana BOS sesuai Peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah melalui Permendikbud No 8 Tahun 2020. Hal ini juga dibuktikan dengan dokumen yang di lakukan oleh peneliti di SDN Keceme I Sleman berupa RKAS dan LPJ BOS.

1. Pembelanjaan / pengadaan barang dan jasa

Pembelanjaan / pengadaan barang dan jasa di SDN Keceme I Sleman terdiri dari berbagai program sekolah yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa di SDN Keceme I Sleman telah menerapkan aturan Pemerintah yang di atur Permendikbud No 8 Tahun 2020 dalam mekanisme pembelanjaan/ pengadaan barang dan jasa.

1. Pembukuan dana BOS

Data mengenai pembukuan dana BOS di SDN Keceme I Sleman di peroleh peneliti dari wawancara kepala sekolah dan bendahara BOS serta guru di SDN Keceme I Sleman. Selain itu juga diperoleh dari studi dokumentasi pembukuan keseluruhan penggunaan dana yang berasal dari dana BOS.

Dalam pembuatan pembukuan tim belanja harus menyertakan bukti transaksi terhadap dana yang telah di keluarkan. Hal ini berguna untuk pembukuan dan pelaporan dana BOS sebagai pertanggungjawaban kepada Pemerintah pusat/ daerah atas penggunaan dana yang diberikan. Bukti dari aspek pembukuan dana BOS diperoleh peneliti melalui jawaban dari hasil dokumentasi dengan pihak sekolah.

1. Pengawasan dan *evaluasi*

Pengawasan dan *evaluasi* dana BOS dilakukan dalam rangka mewujudkan *akuntabilitas* pengelolaan program dana BOS. Pengawasan dilakukan tiga bulan sekali oleh kepala sekolah. Dari jumlah penerimaan sampai pengeluaran, dan masuk dalam berita acara. Sedangkan setiap enam bulan sekali dilakukan pengawasan oleh komite yang mendapat *monitoring* dari pihak dinas.

Komite dalam melakukan pengawasan dan *evaluasi* terhadap dana BOS adalah dengan cara memantau apakah pelaksanaan dana BOS telah sesuai dengan RKAS yang telah di susun dan disahkan pada rapat walimurid. Kegiatan pengawasan di lakukan bertujuan untuk memantau ketepatan dan kebenaran kegiatan yang di lakukan oleh pihak sekolah sesuai dengan RKAS yang telah di buat dan sesuai Petunjuk Teknis BOS.

1. Pelaporan dana BOS

Pelaporan dana BOS di SDN Keceme I Sleman meliputi pelaporan pengelolaan dana BOS kepada pemerintah serta *publikasi* yang di lakukan oleh sekolah terkait dengan penggunaan dana BOS. Data pelaporan dana BOS di peroleh peneliti dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru dan bendahara BOS serta dokumentasi pertanggungjawaban pihak sekolah kepada pemerintah yaitu dengan cara memberikan laporan pengelolaan dana BOS dengan cara tiga tahap.

Analisis hasil komponen pelaporan dana BOS di SDN Keceme I Sleman bahwa sekolah telah membuat laporan dana BOS sesuai dengan pedoman petunjuk teknis BOS. Sekolah melakukan pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan yang berupa laporan lengkap dana BOS yang terdiri dari RKAS, BKU, buku pembantu kas tunai, buku pembantu rekening, buku pembantu pajak, rekap SPJ tahap satu – tiga, rincian objek kegiatan, bukti nota atau kwitansi, foto dokumentasi kegiatan sekolah dengan penggunaan dana BOS.

Selain pelaporan kepada dinas terkait, sekolah juga dituntut untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan dana BOS kepada warga sekolah. Pelaporan tersebut pada saat rapat, sekolah mensosialisasikan dan menginformasikan tentang penggunaan dana kepada guru, komite sekolah dan walimurid. Pelaporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atas terlaksananya program dana BOS kepada Pemerintah yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS di SDN Keceme I Sleman.

Prinsip *akuntabilitas* sangat penting dalam pengelolaan dana BOS. *Akuntabilitas* diperlukan untuk membuat laporan pengelolaan dana BOS menjadi *akurat*, berkualitas dan terpercaya. Penerapan prinsip *akuntabilitas* didalam penelitian ini berarti bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai pendapat Sujarweni dalam jurnal. *Akuntabilitas* dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada, SDN Keceme I Sleman sudah melakukan *akuntabilitas* dengan konsekuen, sehingga setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil dokumen dan wawancara dengan kepala sekolah, guru, bendahara BOS dan komite sekolah terdapat kesamaan jawaban dalam menanggapi tentang akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Data tentang penerapan prinsip akuntabilitas di peroleh peneliti berdasarkan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan kepala sekolah, guru, bendahara BOS dan komite sekolah. Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah menciptakan kepercayaan *stakeholders* dalam pengelolaan keuangan, menetapkan tujuan, dan sasaran yang tepat menggunakan standart dalam proses dan tujuan kegiatan.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penelitian ini berarti laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana sekolah baik kepada orang tua, masyarakat, maupun pemerintah. Akuntabilitas pengelolaan dana BOS yang dilakukan di SDN Keceme I Sleman berupa penjelasan atau pemberian keterangan di papan pengumuman dan sosialisasi ketika rapat dengan komite sekolah dan walimurid. Pihak sekolah juga menjelaskan tentang penggunaan dana BOS secara terinci meliputi sumber keuangan, jumlah yang diterima persiswa dalam 1 bulan dan 1 tahun , rencana kegiatan yang akan di lakukan serta penggunaan dana BOS yang benar sesuai pedoman petunjuk teknis BOS, sehingga memudahkan guru, komite sekolah dan walimurid untuk mengetahui informasi tentang dana BOS.

Berdasarkan dokumen dan wawancara dengan Tim Manajemen sekolah bahwa SDN Keceme I Sleman telah mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah yang berupa laporan keadaan kas, register penutupan kas, buku kas umum, buku pembantu kas, pembantu bank, pembantu pajak, bukti kas keluar, register penutupan kas dan realisasi penggunaan dana BOS. Sebagai laporan pertanggungjawaban kepada warga sekolah dan masyarakat dilakukan dengan menempelkan pagu di papan pengumuman sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa SDN Keceme I Sleman telah menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan dana BOS di SDN Keceme I Sleman diawali dengan perencanaan penyusunan RKAS disusun oleh tim manamjemen BOS. Pelaksanaan dana BOS meliputi: penyaluran dana BOS, pengambilan/ pencairan dana BOS, penggunaan dana BOS, pembelanjaan/pengadaan barang dan jasa serta pembukuan dana BOS. Pengawasan dilakukan tiga bulan sekali oleh kepala sekolah dan setiap enam bulan sekali dilakukan pengawasan oleh komite yang mendapat monitoring dari pihak dinas. Sekolah melakukan pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan yang berupa laporan lengkap dana BOS.
2. Penerapan prinsip *akuntabilitas* dalam pengelolaan dana BOS di SDN Keceme I Sleman adalah adanya pertanggung jawaban antara pihak sekolah dengan pihak terkait. Bentuk pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS di SDN Keceme I Sleman baik kepada UPT maupun Dinas Pendidikan berupa pelaporan rekap anggaran belanja bulanan yang dilaporkan secara tiga tahap.

**Saran**

Pencapaian tujuan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dipengaruhi oleh *akuntabilitas*. Sekolah Dasar disarankan agar mengoptimalkan peran setiap pengurus yang ada untuk ikut turut serta dalam peningkatan praktik manajemen serta pencapaian pengelolaan dana BOS. Dana BOS sangat berperan penting terhadap perubahan bagi masyarakat maupun peserta didik, maka dari itu pencapaian tujuan dana BOS diharapkan memberikan *kontribusi* bagi kemajuan pendidikan.

**Keterbatasan**

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan, yang dimana penelitian ini hanya melibatkan SD Negeri Keceme I Sleman saja. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian atau merubah objek penelitian. Penelitian yang dilakukan saaat ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan yaitu : Kondisi pandemi yang membuat peneliti mengalami sedikit kesulitan mengatur waktu untuk bertemu dengan informan, sebab penerapan WFH. Selain melakukan wawancara langsung, peneliti juga menggunakan media sosial whatshapp

**DAFTAR PUSTAKA**

Djamarah, Syaiful, Bahri. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mulyasa. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nuryadi, dkk. 2017. *Dasar-Dasar Statistik Penelitian.* Yogyakarta: Universitas Mercubuana.

Silele, E., dkk. 2017. “Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat)”. *Jurnal EMBA* Vol. 5 No. 2 Juni 2017.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V.W. 2015. *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sujarweni, W.V. 2015. *Sistem Akuntansi.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suparlan. 2013. *Manajemen Berbasis Sekolah dari Teori Sampai dengan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Torang, S. 2016. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.